KONSEP PERTAHANAN SEBAGAI PUBLIC GOOD ATAU MONOPOLI ALAMIAH MENURUT SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Endro Tri Susdarwono

Universitas Peradaban
Email: saniscara99midas@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the debate about the economic concept which states that defense is a public good and which states that defense is not a public good but a natural monopoly based on understanding according to the market economy system and the populist economic system. This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The approach in this study uses a descriptive approach. Is national defense public goods purely (public good)? We can divide this question into three parts. (1) Is the national defense of goods? (2) Does national defense have the characteristics of jointness? (3) And whether national defense has characteristics without exception (non-exclusion). Association in the sense of controlling the lives of many people is all branches of production of goods and services whose results are used by everyone, or almost everyone. So defense as a product can be interpreted as a branch of production that controls the lives of many people because it can be said that defense is the same concept as the concept of "basic needs". All people in the country of Indonesia need defense and this is also reinforced with the aim of having a state in paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution "Then to form an Indonesian government that protects all the people of Indonesia and all of Indonesia's blood." The results of this study state that the reason why the government supplies national defense is not because national defense is public goods. (1) that national defense is a natural monopoly and (2) citizens will fear that if a private company controls a monopoly, the owner of the company can use his power to overthrow the government.

Keyword: public good; jointness; non-exclusion

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara. Pengertian ekonomi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan, memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan, baik oleh seseorang, sekelompok orang, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks lebih luas, pada skala makro, pengertian ekonomi mencakup masalah alokasi sumber daya nasional, pendapatan, distribusi pendapatan, pengeluaran, pertumbuhan, inflasi, suplai uang, likuiditas, dan neraca pembayaran (Yusgiantoro, 2014; Tuwanto, 2015).

Pertahanan secara umum mengandung makna mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara diartikan sebagai upaya untuk membangun, menggunakan, dan membina kekuatan negara dalam rangka menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara, dan keselamatan bangsa (Kennedy, 2018; Yulianti et al., 2020). Pengertian yang sama dikemukakan oleh McGuire

(1995) bahwa pertahanan negara adalah upaya untuk menetapkan, memajukan, mengusulkan, mengedepankan, dan mempertahankan kepentingan negara dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Supriyatno, 2014).

Barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan pertahanan adalah rasa aman dari ancaman yang timbul. Dengan demikian, ekonomi pertahanan merupakan ilmu pengetahuan untuk mencari cara terbaik dari alokasi berbagai sumber daya nasional guna memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman. Dalam perkembangan, ancaman terhadap suatu negara tidak hanya berasal dari luar negeri, seperti ancaman dari negara tetangga, kelompok negara-negara yang bersekutu, atau teroris internasional; namun juga ancaman dari dalam negeri seperti separatisme dan terorisme (Palulun, 2016). Ancaman dari dalam negeri, sering menjadi bagian dari kegiatan pengamanan yang termasuk dalam kategori keamanan ketertiban nasional (Kamtibnas), bukan pertahanan negara (Saragih, 2018). Namun demikian, apabila ancaman dari dalam negeri sudah meningkat dan menunjukkan eskalasi pada tingkat tertentu, yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan bangsa, dan keamanan penduduk; maka aspek pertahanan negara akan menjadi bagian dari keamanan dalam negeri (Kamdagri) (Yusgiantoro, 2014).

Apakah pertahanan nasional barang publik murni (public good)? Kita dapat membagi pertanyaan ini menjadi tiga bagian. (1) Apakah pertahanan nasional barang (good)? (2) Apakah pertahanan nasional memiliki karakteristik jointness? (3) Dan, apakah pertahanan nasional memiliki karakteristik tanpa pengecualian (non-exclusion). Sedangkan pendapat lain juga mengatakan bahwa pertahanan adalah bukan barang public murni (public good), melainkan monopoli alamiah (Gunning, 2002). Monopoli alamiah pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan monopoli pada umumnya, dimana hambatan yang masuk ke pasar minimal disebabkan oleh tiga hal utama (Mankiw, 2012):

- Suatu sumber daya inti hanya dimiliki oleh suatu perusahaan.
- Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk membuat barang atau jasa tertentu.
- Biaya produksi barang tersebut untuk satu produsen lebih efisien daripada untuk banyak produsen

Barang yang muncul dalam situasi *monopoli alamiah*, dimana dia bersifat ekskludabel, namun tidak memiliki rival. Contoh paling mudah adalah jalan tol dalam kondisi yang kosong. Dengan berbagai macam alasan, misalnya adanya perbaikan secara massif, seseorang bisa saja dicegah untuk memasuki jalan tol meski ia berada dalam kondisi yang kosong. Namun dia tidaklah bersifat rival, karena ketika seseorang masuk ke dalam jalan tol yang kosong, dan dia tidak ada satupun aturan yang mencegah setiap orang untuk masuk ke dalamnya, maka karena keadaan tersebut atau karena skala ekonomi (*economies of scale*) yang ia nikmati, maka orang tersebut menikmati kondisi monopoli alamiah.

Menurut UU pasal 1 ayat 1 No 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Teori ekonomi public (*public economics*) akan lebih dapat menjelaskan mengenai ekonomi pertahanan. Seperti halnya ekonomi public, pertahanan adalah output yang dapat dipandang sebagai barang public yang bersifat noneksklusif dan nonrivalitas dalam suatu negara dan di antara negara-negara sekutunya. Cabang ekonomi ini sangatlah penting karena ekonomi pertahanan terkait erat dengan kepentingan public, bahkan dukungan anggaran pertahanan yang berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak yang dalam praktiknya harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable & auditable*).

Teori kegagalan pasar sangat erat kaitannya dengan ekonomi pertahanan, karena tindakan salah satu pihak akan memengaruhi kesejahteraan pihak lain tanpa ada kompensasi. Semakin banyak senjata yang dimiliki suatu negara dapat menghasilkan eksternalitas positif terhadap negara sahabatnya atau negative terhadap negara musuhnya. Ekonomi kuantitatif seperti riset

operasi sangat banyak dipakai dalam optimalisasi bidang pertahanan. Teori organisasi industri merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang penting dalam studi industri pertahanan, pengadaan, penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan, serta berbagai kebijakan industri seperti kerja sama, lisensi produksi, trade off, dan offset. Ekonomi tenaga kerja, ekonomi internasional, public choice (pilihan public), pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi mikro serta ekonomi makro adalah bidang-bidang ekonomi lain yang sangat berkaitan dengan ekonomi pertahanan. Salah satu yang sangat menonjol dalam percaturan ekonomi pertahanan adalah keterbukaan hubungan antar bangsa di mana keterkaitan satu dengan yang lain perlu dituangkan dalam prinsip-prinsip ekonomi internasional terutama terkait dengan kerja sama bilateral, multilateral ataupun pada tingkat dunia di PBB. Disinilah peran dari kaidah-kaidah dalam ekonomi internasional yang dapat dipakai banyak negara untuk memberi kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Di pihak lain, warga negara mendapatkan surplus ekonomi (atau penghasilan) dari kegiatan produksi yang dilakukannya (Marlinah, 2017). Surplus ekonomi ini sebagian dikontribusikan kepada negara dalam bentuk pajak, yang kemudian digunakan oleh negara untuk membiayai sector pertahanan dan nonpertahanan. Pembiayaan sector pertahanan untuk pemenuhan kebutuhan rasa aman bagi semua warga negara perlu dilakukan sehemat mungkin, agar tujuan pertahanan negara dan tujuan bernegara lainnya dapat tercapai secara proporsional. Ilmu ekonomi bermanfaat dalam memilih cara-cara yang paling efektif, efisien, dan ekonomis dalam memberikan rasa aman bagi warga negara. Ketika menerapkan ilmu ekonomi, ahli ekonomi pertahanan menggunakan metode ekonomi, baik teoretis maupun empiris, terhadap isu-isu pertahanan. Selanjutnya dihasilkan evaluasi, analisis, kebijakan, strategi, dan rencana yang proses keputusannya dilaksanakan oleh para pelaku pertahanan. Ilmu ekonomi, tentu bukan satu-satunya disiplin ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan negara atau dalam proses pengambilan keputusan dalam sector pertahanan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang perdebatan mengenai konsep ekonomi yang menyatakan bahwa pertahanan merupakan public good dan yang menyatakan bahwa pertahanan bukan merupakan public good melainkan monopoli alamiah berdasarkan pemahaman menurut sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi kerakyatan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memaparkan atau menggambarkan pemahaman bahwa produk hasil pertahanan merupakan barang public (public good) dan relevansinya dengan sistem ekonomi kerakyatan, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, itu dapat mengenai kondisi/hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat/efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertahanan Sebagai Public Good Menurut Sistem Ekonomi Pasar

Bidang ekonomi pertahanan berbeda dengan bidang ekonomi lain dalam hal objek yang diteliti, aturan kelembagaan dari organisasi pertahanan, seperti tata cara pengadaan persenjataan, dan isu-isu yang diteliti. Michael D. Intriligator (1990) menjelaskan bahwa isu-isu yang terkait dengan ekonomi pertahanan, antara lain tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran pertahanan terhadap produk dan lapangan kerja di dalam dan luar negeri, pertimbangan mengenai eksistensi dan besaran lingkup pertahanan, kaitan antara belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, dan implikasi belanja pertahanan dalam lingkup pertahanan dalam rangka kestabilan atau ketidakstabilan internasional (Yusgiantoro, 2014).

Hasil kegiatan pertahanan adalah barang public murni, karena bersifat noneksklusif dan nonrivalitas. Noneksklusif yaitu memberikan manfaat bagi semua warga negara tanpa kecuali. Manfaat dari hasil kegiatan ini dapat dikatakan sebagai tidak kasar mata (intangible). Nonrivalitas yaitu konsumsi tambahan dapat dimungkinkan tanpa biaya marjinal. Penggunaan tambahan satu unit barang tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang yang sama. Barang public seperti ini berbeda dengan barang privat, yang memberi manfaat hanya bagi orang-orang tertentu dan penggunaan tambahan satu unit oleh seseorang akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Dilihat dari karakteristik barang maka konsep yang menyatakan bahwa pertahanan sebagai public good adalah sebagai berikut (Hermawan, 2020):

- a. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Barang noneksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil atau film dimana pengecualian-pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.
- b. Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol, konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengonsumsi.

Suatu barang disebut tidak punya tandingan (nonrival) dalam konsumsi ketika konsumsi A atas barang ini tidak bercampur baur dengan konsumsi B atas barang tersebut. Hal ini berarti bahwa manfaat barang ini adalah kolektif diberikan pada setiap orang. Pertahanan nasional, misalnya, memberikan manfaat untuk semua masyarakat. Fakta bahwa saya dilindungi oleh pertahanan nasional tidak akan mengurangi perlindungan yang Anda dapatkan; setiap warganegara dilindungi sebanyak perlindungan pada warganegara lain. Jika udara diberishkan saya yang menghirup udara itu tidak mencampuri diri anda yang menghirup pula udara itu dan (pada kondisi normal) udara itu tidak habis digunakan karena ada lebih banyak orang lain yang menghirupnya. Barang pribadi sebaliknya punya tandingan (rival) dalam konsumsi, jika saya makan hamburger, anda tidak bisa ikut memakannya juga.

Suatu barang kadang-kadang bisa menghasilkan manfaat kolektif dan masih merupakan rival dalam konsumsi. Ini terjadi ketika ada kesesakan. Suatu taman atau lapangan bisa mengakomodasi banyak orang pada saat yang sama, yang menghasilkan manfaat kolektif untuk setiap orang. Akan tetapi, ketika terlalu banyak orang yang bersesakan di hari yang panas, mereka akan mulai saling mencampuri kesenangan. Sebagian besar barang public juga tidak bisa dikecualikan (*nonexcludable*). Begitu barang ini diproduksi, orang tidak bisa dikecualikan dengan alasan apapun dari menikmati manfaatnya. Begitu sistem pertahanan nasional dibangun, sistem itu melindungi setiap orang (Case & Fair, 2008).

Pertahanan Nasional sebagai Monopoli Alami Menurut Sistem Ekonomi Pasar

Gagasan pertahanan nasional seharusnya menghentikan kita terlalu cepat untuk menjawab pertanyaan “apakah pertahanan nasional merupakan barang?”. Barang publik murni harus menghasilkan manfaat bagi semua orang. Tidak semua orang di suatu negara, tetapi semua

orang pada umumnya - di dunia. Jelas bahwa pertahanan nasional yang efektif oleh satu negara tidak menguntungkan orang-orang yang tinggal di negara lain dan yang merasa terancam oleh pertahanan nasional negara pertama. Jadi, ketika orang mengatakan bahwa pertahanan nasional memiliki karakteristik “jointness”, maksudnya bahwa pertahanan nasional memiliki karakteristik “jointness” untuk orang-orang yang tinggal di negara di mana pertahanan nasional disediakan. Kita mungkin mengatakan bahwa mereka menganggap itu adalah “barang publik nasional murni (*public good*).” Kita bisa mendefinisikan pertahanan sebagai barang untuk warga negara terhadap negara yang menyediakan (Gunning, 2002).

Tapi ini tidak sepenuhnya menghilangkan ambiguitas. Jika Anda adalah warga negara Prancis pada tahun 1944, negara Anda diduduki dan di bawah pemerintahan Nazi Jerman. Anda mungkin tidak akan mendapat manfaat dari pasokan pertahanan nasional Jerman melawan Sekutu. Atau jika Anda adalah warga Granada pada tahun 1983 atau Haiti pada tahun 1994, Anda mungkin tidak akan mendapat manfaat dari pertahanan negara Anda melawan pasukan A.S. Jika Anda adalah warga negara Korea Utara hari ini, tampaknya Anda ragu-ragu mendapat manfaat dari pertahanan negara Anda. Poin pentingnya adalah bahwa beberapa penduduk suatu negara mungkin lebih suka hidup di bawah pemerintahan rezim politik yang sangat militer yang mereka harapkan dapat menggantikan negara yang saat ini menyediakan pertahanan negara. Jika ini benar, pertahanan negara bahkan tidak akan merupakan kebaikan bagi orang-orang itu. Mungkin keburukan. Klaim bahwa pertahanan nasional adalah barang publik murni nasional mengasumsikan bahwa semua warga negara menganggap pertahanan terhadap musuh tertentu sebagai keuntungan.

Karakteristik Jointness

Mari kita tanyakan apakah pertahanan nasional memiliki karakteristik “jointness”. Jointness berarti bahwa konsumen tambahan dapat ditambahkan tanpa meningkatkan biaya produksi. Biaya marjinal untuk menambah konsumen ke jumlah tertentu adalah nol. Jika 100.000 orang sekarang menikmati pertahanan nasional, biaya untuk menambah satu lagi harus nol. Sangat mudah untuk dirancukan atau dibingungkan biaya marjinal rendah dengan biaya marjinal nol. Misalkan ada biaya marginal konstan \$ 10. Di bawah kondisi seperti ini, jika 100.000 konsumen mengkonsumsi barang, biaya memasok mereka akan menjadi \$ 1.000.000. Untuk menambah satu konsumen lagi hanya \$ 10. Ini kelihatannya sangat kecil dibandingkan dengan \$ 1.000.000 yang sudah dibayarkan. Namun, ini bukan nol. Bahkan, biaya tambahan itu persis sama dengan biaya rata-rata memasok 100.000 konsumen lainnya. Agar “jointness” ada, biaya marjinal untuk menambah konsumen harus nol.

Agar pertahanan nasional memiliki karakteristik “jointness”, setidaknya satu dari dua kondisi berikut harus ada. Pertama, harus memungkinkan untuk menambahkan konsumen ke lokasi geografis tertentu tanpa biaya, tanpa mengurangi tingkat pertahanan yang ditawarkan kepada orang lain yang sudah ada di sana. Dengan kata lain, akan ada nol biaya kemacetan. Kedua, harus mungkin untuk memperluas pertahanan untuk mencakup wilayah tambahan di mana tambahan orang hidup tanpa biaya tambahan. Kondisi kedua tampaknya tidak realistis. Tampaknya jelas bahwa pertahanan nasional konvensional tidak dapat melindungi wilayah geografis tambahan tanpa biaya tambahan. Fakta ini terbukti di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina, yang terdiri dari banyak pulau. Di Amerika Serikat, beban pertahanan meningkat secara substansial ketika Hawaii dan Alaska ditambahkan sebagai negara bagian. Namun, kondisi pertama tampaknya ada, setidaknya dalam batas tertentu. Untuk wilayah geografis tertentu, tambahan orang dapat ditambahkan, dalam batas-batas, tanpa meningkatkan biaya mempertahankan populasi total dengan cara konvensional. Namun, di luar titik tertentu, karena semakin banyak orang ditambahkan ke daerah tertentu, kemacetan terjadi. Sekalipun biaya produksi pertahanan nasional tetap sama, ketika kita memperhitungkan semua biaya penambahan orang, kita harus menyimpulkan bahwa biaya marjinal bukanlah nol.

Karakteristik Non-Pengecualian/Non-Exclusion

Apakah pertahanan nasional memiliki karakteristik non-pengecualian (non-exclusion)? Jawabannya tampaknya datar "tidak." Karena pertahanan nasional dipasok ke wilayah geografis, adalah hal sederhana untuk melarang seseorang yang memasuki wilayah itu dan mengambil bagian dalam manfaat pertahanan nasional. Biaya pengecualian tidak nol. Perbatasan nasional harus diawasi, kartu identitas dikeluarkan, pengunjung disaring dan dipantau, dan sebagainya. Namun, pengecualian tampaknya dimungkinkan dengan biaya uang yang wajar (Gunning, 2002).

Misalkan seseorang menolak membayar bagiannya dari beban pajak untuk pertahanan nasional. Lalu dia bisa diasingkan. Paspornya bisa diambil dan dia bisa dipaksa meninggalkan negara itu. Secara teknis, pengucilan dimungkinkan dan dapat dicapai dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu faktor yang menyulitkan adalah bahwa pemerintah dapat memuat konstitusi yang mencegah pengasingan warga negara yang menolak membayar harga untuk layanan pertahanan nasional. Untuk alasan konstitusional, pengucilan kemungkinan tidak mungkin dilaksanakan. Tidak ada penyertaan dalam kasus ini bukan karena sifat teknis dari barang tetapi pada alasan struktur pemerintah.

Jika pertahanan nasional bukan barang publik, apakah ada alasan lain untuk kegagalan pasar? Jawabannya sepertinya ya. Pertahanan nasional tampaknya menjadi monopoli alami. Untuk mengetahui alasannya, mari kita coba bayangkan sebuah negara di mana pertahanan nasional dipasok melalui ekonomi pasar. Kami berasumsi bahwa para pemasok pertahanan nasional semuanya memiliki loyalitas nasional dan tidak akan pernah menggunakan senjata mereka terhadap warga negara lain. Dengan demikian, tidak ada peluang perang saudara. Jika kita berasumsi sebaliknya, pasokan pasar tidak mungkin.

Kami mungkin berasumsi pada awalnya bahwa perusahaan penyedia pertahanan nasional akan bersaing di pasar untuk pelanggan, tidak seperti bioskop yang bersaing sekarang. Terdapat "jointness", sehingga setiap perusahaan ingin mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Untuk memaksakan pengecualian (*exclusion*), setiap perusahaan harus memilih bagian tertentu dari suatu negara tempat menawarkan layanannya. Dengan demikian, konsumen mungkin memiliki pilihan antara tinggal di E dan membeli dari perusahaan pertahanan E atau tinggal di P dan membeli dari perusahaan P. Perusahaan pertahanan E mungkin mengenakan harga yang lebih tinggi tetapi menawarkan kuantitas yang lebih tinggi sementara Perusahaan pertahanan P membebankan harga yang lebih rendah tetapi memasok kuantitas yang rendah. Jika biaya penyediaan jumlah tertentu pertahanan nasional lebih tinggi di satu bagian negara daripada di bagian lain, kami mungkin membayangkan bahwa biaya yang harus dibayar konsumen akan lebih rendah untuk kualitas tertentu di bagian di mana biaya lebih rendah. Jika seorang konsumen tidak puas dengan harga pertahanan nasional yang tinggi di yurisdiksinya, ia dapat pindah ke yurisdiksi dengan harga lebih rendah. Dengan demikian bangsa akan dibagi menjadi zona pertahanan nasional.

Sekarang terbukti bahwa agar sistem ini bekerja, pemerintah harus setuju untuk mengizinkan setiap perusahaan pertahanan nasional mengecualikan (*exclusion*) penduduk yang menolak untuk membayar biaya pertahanan nasional-nya dari zona pertahanan nasional. Kalau tidak, seseorang yang menolak untuk membeli layanan pertahanan nasional sama sekali tidak dapat dikecualikan. Kita mungkin mengira bahwa seseorang yang memilih untuk tidak membayar biaya pertahanan nasional sama sekali akan dikeluarkan dari negara tersebut atau dikirim ke tempat di negara yang tidak dilindungi dan dengan demikian rentan terhadap serangan.

Kami telah mencatat bahwa tampaknya ada ukuran "jointness" yang relatif tinggi dalam permintaan. Ini berarti bahwa konsumen tambahan dapat ditambahkan ke area tertentu dengan biaya marjinal nol (atau setidaknya dengan biaya marjinal lebih rendah daripada konsumen sebelumnya). Misalkan Anda saat ini tinggal di E dan Anda membayar harga yang sama untuk layanan pertahanan nasional sebagai seseorang seperti Anda yang tinggal di P. Perusahaan pertahanan P dapat menambahkan Anda sebagai pelanggan dengan biaya nol atau relatif rendah.

Itu bisa mengurangi harga untuk Anda di bawah apa yang Anda bayar dan, pada saat yang sama, mengurangi harganya ke konsumen yang ada. Dengan demikian, itu akan memiliki insentif untuk memotong harga kepada Anda yang ditawarkan oleh perusahaan pertahanan E. Tentu saja, itu akan memiliki insentif yang sama untuk mengurangi harga untuk semua pelanggan perusahaan pertahanan E. Secara praktis, ia akan mencoba menarik warga ke distrik pertahanan nasional. Kita mungkin mengharapkan dalam keadaan ini bahwa perusahaan dari berbagai kabupaten akan bersaing dengan menawarkan diskon kepada pendatang baru dari kabupaten lain.

Situasi yang kami gambarkan ini sangat mirip dengan teori persaingan perusahaan utilitas publik - monopoli alami. Dalam teori utilitas publik, perusahaan utilitas dapat meningkatkan skalanya dan mengurangi biaya rata-rata jangka panjang. Jika dua perusahaan dengan ukuran yang sama menghasilkan laba normal, satu dapat meningkatkan ukurannya dan mengurangi biayanya. Dengan demikian, ini dapat mengurangi harga dan menghasilkan laba yang lebih tinggi karena akan dapat menarik pelanggan dari perusahaan lain. Satu-satunya hasil jangka panjang yang layak adalah satu di mana perusahaan tunggal memasok semua konsumen. Industri pertahanan nasional yang kami pikirkan serupa, kecuali bahwa ada biaya kemacetan di luar titik tertentu. Untuk melihat kesamaannya, anggaplah pada awalnya bahwa tidak ada biaya kemacetan. Bayangkan dua wilayah pertahanan nasional yang berdekatan masing-masing dengan ukuran dan populasi yang sama. Karena biaya marjinal untuk menambah satu konsumen lagi hampir nol, setiap pemasok pertahanan nasional akan menawarkan diskon khusus kepada konsumen yang beralih dari pemasok lain. Seperti dalam kasus teori utilitas publik, satu-satunya situasi yang kompatibel dengan keseimbangan adalah situasi di mana hanya satu perusahaan memasok pertahanan nasional.

Untuk satu perusahaan untuk memasok layanan pertahanan nasional ke semua konsumen, semua konsumen harus pindah ke distrik perusahaan pertahanan nasional. Tetapi karena semakin banyak orang yang pindah, biaya kemacetan akan meningkat. Selain itu, biaya kemacetan marginal akan naik. Kedatangan setiap penduduk baru akan menyebabkan biaya kemacetan yang lebih tinggi daripada penduduk sebelumnya. Mungkin, akan ada titik di mana biaya marjinal untuk memasok warga di distrik yang ada saat ini akan sama dengan biaya marjinal untuk memasok di kabupaten baru ditambah biaya kemacetan marjinal. Jika demikian, keseimbangan jangka panjang akan membutuhkan lebih dari satu pemasok pertahanan nasional.

Mari kita anggap titik seperti itu tidak tercapai. Dengan kata lain, anggaplah bahwa semua pertahanan nasional dari semua warga negara dipasok dari satu kabupaten. Pemasok akan menjadi perusahaan monopoli. Pertimbangkan sekarang situasi yang dihadapi oleh pemasok monopoli. Kami berasumsi bahwa biaya marjinal untuk mempertahankan ruang tambahan adalah positif dan bahwa mungkin ada masalah *crowding*. Mengingat karakteristik ini, perusahaan mungkin menyediakan berbagai kualitas pertahanan nasional. Ini mungkin menawarkan diskon kepada konsumen yang bersedia hidup bersama dalam ruang geografis yang relatif kecil, sementara itu membebankan harga yang lebih tinggi kepada individu yang tinggal di daerah berpenduduk kurang padat. Ini akan mendorong populasi yang lebih padat, meskipun keuntungan lain dari tinggal di daerah yang kurang padat, seperti mengurangi kepadatan (atau mungkin keuntungan pertanian) mungkin ada untuk mengompensasi sebagian orang dengan harga pertahanan nasional yang lebih tinggi.

Tentu saja, jika hanya ada satu perusahaan pertahanan nasional, itu akan cenderung membebankan harga monopoli, atau kisaran harga monopoli tergantung pada lokasi. Kita telah melihat bahwa para ekonom Pigouvian telah merekomendasikan beberapa solusi terhadap masalah monopoli alami: penetapan harga marginal, penetapan harga biaya rata-rata, dan kontrol pemerintah. Dalam setiap kasus, ada masalah insentif yang serius. Perusahaan dan badan pemerintah yang diatur memiliki insentif kecil untuk mengendalikan biaya; dan regulator berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mengetahui apakah metode produksi yang digelembungkan biaya digunakan. Juga, sulit bagi regulator untuk memberikan insentif

kepada perusahaan monopoli alami untuk menciptakan. Kita akan mengharapkan hasil yang sama dari monopoli alami pertahanan nasional yang diatur.

Jika kita mengandalkan regulasi, kita bisa mengharapkan inefisiensi besar. Tetapi jika kita membiarkan monopoli tidak diatur, pemasok pertahanan nasional akan menjadi sangat kaya. Selain itu, perusahaan monopoli mungkin akan mengecualikan konsumen meskipun mereka menghargai pertahanan nasional dengan harga lebih tinggi daripada biaya menambahkan mereka konsumen. Alasannya adalah kesulitan yang dimiliki pemasok pertahanan nasional dalam membedakan permintaan satu konsumen dari yang lain. Solusi yang mungkin adalah dengan memberikan waralaba waktu terbatas dalam memasok pertahanan nasional dan meminta pemasok pertahanan nasional untuk mengajukan penawaran untuk waralaba itu. Misalnya, kami dapat memberikan pemasok lima tahun untuk kontrak nasional untuk memasok dalam kondisi tertentu. Kami akan mengundang banyak perusahaan untuk mengajukan penawaran kontrak.

Tujuan diskusi kami tentang pertahanan nasional terutama untuk menentukan apakah pasokan pasar bebas pertahanan nasional akan menyebabkan beberapa jenis kegagalan pasar. Untuk membuat latihan kami sesuai dengan teori kegagalan pasar, kami berasumsi bahwa siapa pun bebas untuk membentuk perusahaan pertahanan nasional dan bahwa perusahaan pertahanan nasional akan tetap loyal kepada bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya tidak masuk akal untuk berharap bahwa warga suatu negara akan mengizinkan pasokan pasar. Pertama, karena perusahaan yang bersaing harus memiliki kendali atas daya tembak besar-besaran, persaingan mereka mungkin berubah seperti perang. Pemilik satu perusahaan pertahanan nasional dapat mengatakan kepada konsumen layanan perusahaan lain "Jika Anda terus membeli pertahanan nasional Anda dari pemasok lain, perusahaan saya akan menyerang Anda dan membuktikan kepada Anda bahwa perusahaan lain tidak dapat membela Anda sebaik yang kami bisa".

Bahkan jika ada persaingan damai di antara perusahaan-perusahaan pertahanan nasional, ada alasan utama mengapa warga negara lebih memilih pasokan pemerintah daripada alternatif. Adalah orang yang mengendalikan monopoli pertahanan nasional dapat menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Secara realistis, bagaimana bisa pemerintah yang tidak memiliki kendali atas pertahanan nasional mengatur monopoli pertahanan nasional? Jika regulator pemerintah memutuskan bahwa kepala angkatan bersenjata membebaskan harga terlalu tinggi untuk layanannya dan harus dipenjarakan, bagaimana ia bisa menegakkan keputusannya? Selain itu, apa yang akan mencegah kepala angkatan bersenjata dari hanya mengambil harta apa pun yang dia inginkan? Pemilik perusahaan pertahanan nasional amonopoli mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan hanya mengambilnya dari warga negara daripada dengan melindungi warga negara terhadap agresor asing. Jadi tampaknya alasan mengapa pemerintah memasok pertahanan nasional bukan karena pertahanan nasional adalah barang publik. (1) bahwa pertahanan nasional adalah monopoli alami dan (2) warga akan takut bahwa jika perusahaan swasta mengendalikan monopoli, pemilik perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk menggulingkan pemerintah.

Pertahanan Sebagai Monopoli Alamiah Menurut Sistem Ekonomi Kerakyatan

Konstitusi yang memuat kebijakan ekonomi secara lebih rinci, materi yang diatur biasanya sangat luas, rinci, dan beragam atau disebut konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur soal-soal perekonomian yang mencakup beragam sektor ekonomi dan keuangan. Ketentuan mengenai kepemilikan oleh Negara, dan lain-lain sebagainya, yaitu:

- a) hal-hal yang mutlak merupakan kekayaan milik Negara;
- b) hal-hal yang bersifat terbuka untuk dimiliki oleh siapa saja;
- c) bidang usaha yang secara eksklusif hanya dilakukan oleh Negara;
- d) bidang usaha yang dapat dilakukan secara terbuka oleh siapa saja.

Konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 sebelum adanya amandemen dinyatakan bahwa: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang seorang (UUD 1945).

Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah system perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan diselenggarakan berdasarkan tiga prinsip berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat disaksikan betapa besarnya peranan Negara dalam system ekonomi kerakyatan. Jika dilengkapi dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peranan Negara dalam system ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi; (1) mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional; (2) mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) melindungi hak setiap warga Negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) mengembangkan panti-panti social bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar (Asshiddiqie, 2010). Adapun ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 di atas, adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian terbagi dalam 2 (dua) wilayah:
 - A. Wilayah Sektor Formal, terdiri atas:
 - 1) Wilayah cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara; dan
 - 2) Wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - B. Wilayah sektor informal, disebut juga sebagai wilayah cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Kecuali dalam wilayah cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara; peranan pemerintah dalam perekonomian lebih dititik-beratkan sebagai pengawas dan pengatur;
3. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak;
4. Ruang gerak usaha-usaha swasta yang tidak berbentuk koperasi terbatas pada wilayah cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Karena skala kegiatannya rata-rata kecil maka wilayah ini tidak diatur oleh pemerintah;
5. Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Keberadaan BUMN dalam aktivitas perekonomian di Indonesia mendapat landasan yuridis berupa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang memberikan hak kepada Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

Berdasarkan bunyi pasal 33 ayat 2 itu, maka dengan mudah dapat diketahui bahwa dalam perekonomian Indonesia, di samping terdapat “cabang-cabang produksi yang penting bagi

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak”, juga terdapat cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak”. Perbedaan antara keduanya terletak pada “dikuasai” dan “tidak dikuasai”nya oleh Negara. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang perlu dijawab sehubungan dengan pasal 33 ayat 2 ini adalah : Apakah arti kata “dikuasai” sebagaimana digunakan oleh pasal 33 ayat 2 (dan 3) tersebut ? Dua kutipan pernyataan Bung Hatta berikut kiranya dapat menjawab pertanyaan itu secara jelas.

“Dalam pada itu menurut pasal tersebut seterusnya, Negara bertindak sebagai pelindung dan pembangun perekonomian rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semuanya itu tidak berarti, bahwa pemerintahan sendiri menjadi bertindak dengan segala embel-embel birokrasinya. Kewajiban produksi dan membangun itu dapat diserahkan kepada badan lain yang pekerjaannya diatur dan atau dikontrol oleh pemerintah. Semangat pasal 33 itu ialah mempertahankan autonomi dalam lingkungan usaha dengan bertanggung jawab kepada pengurus masyarakat yang lebih tinggi”.

“Dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau ondernemer, lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal”(Manan, 1995).

Dari kedua kutipan di atas jelas, yang dimaksud dengan “dikuasai” dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 bukanlah diselenggarakan ataupun dimiliki oleh Negara, melainkan diawasi dikontrol dan diatur oleh Negara. Dengan demikian pasal 33 ayat 2 pada dasarnya menyatakan : Di samping terdapat “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang penyelenggaraannya diawasi dan diatur oleh Negara”, dalam perekonomian Indonesia juga terdapat “cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi Negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang penyelenggaraannya tidak diawasi dan tidak diatur oleh Negara. Bagi orang awam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara adalah semua kegiatan produksi barang dan jasa yang “sine qua non” untuk menjalankan roda pemerintahan yang kalau tidak ada, pemerintahan itu tidak akan jalan atau akan macet atau sekurang-kurangnya terhambat. Asosiasi pertama adalah produksi jasa pertahanan dan keamanan, jasa telekomunikasi, jasa pemerintahan, jasa pendidikan, jasa peradillan, dan jasa hubungan luar negeri.

Namun kalau direnungkan lebih lanjut ternyata tidak sesederhana itu. Dapat dikatakan bahwa semua produksi barang dan jasa itu penting bagi Negara. Penting kalau diingat dalam makna negatif. Artinya kalau suatu cabang produksi barang atau jasa itu tidak ada, akan terasa ketiadaannya itu oleh semua orang. Atau kalau cabang produksi itu disalah gunakan, maka seluruh Negara merasakannya. Misalnya produksi morfin. Morfin adalah suatu barang yang penting bagi pengobatan, meskipun mungkin dianggap tidak penting bagi Negara secara keseluruhan. Tetapi penyalahgunaannya akan sangat mengganggu roda pemerintahan, dan ketiadaan morfin akan sangat dirasakan oleh rumah sakit-rumah sakit. Akhirnya kalau kita menanyakan apakah benda atau jasa ini penting buat Negara, jawabannya hampir pasti “penting”. Karena itu penyebutan beberapa cabang produksi di atas bersifat enumerative, dan tidak limitative.

Peneliti menduga bahwa status penting dan tidak pentingnya semua cabang produksi barang dan jasa itu merupakan suatu “continuum”, dengan cabang produksi yang vital dan tidak boleh tidak ada untuk Negara di satu ujung hingga cabang produksi yang oleh orang banyak dinilai jauh dari kepentingan Negara. Misalnya pertahanan dan perlindungan keamanan bagi

warga Negara adalah satu ujung sedang produksi barang mewah yang tidak penting buat Negara sebagai ujung continuum yang lain.

Siapakah yang menilai suatu cabang produksi itu penting bagi Negara atau tidak ? Pada tahap pertama tentu adalah warga perseorangan dan atas nama perseorangan. Tergantung pada kedudukannya perseorangan ini dapat menentukan atau tidak. Tahap selanjutnya adalah dunia keilmuan, seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Tahap ketiga adalah kelompok masyarakat, seperti Ormas, dan Orpol dan lembaga keagamaan. Tahap terakhir adalah pemerintah sendiri atau mungkin majelis tertinggi. Pada akhirnya yang menilai penting tidaknya suatu cabang produksi itu bagi Negara adalah perimbangan kekuatan suara dalam masyarakat. Kedengarannya pendapat ini tidak ilmiah. Namun tentu saja dalam menemukan penting atau tidak penting itu harus disertai dengan argumentasi yang dalam hal tertentu dapat bersifat ilmiah.

Asosiasi pertama pada pengertian menguasai hajat hidup orang banyak adalah semua cabang produksi barang dan jasa yang hasilnya dipakai oleh semua orang, atau hampir semua orang. Jadi pertahanan sebagai suatu produk dapat diartikan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak karena dapat dikatakan bahwa pertahanan merupakan konsep yang sama dengan konsep "basic needs". Semua orang di negara Indonesia membutuhkan pertahanan dan ini diperkuat juga dengan tujuan bernegara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Sepintas lalu atau anggapan orang awam adalah bahwa dikuasai oleh Negara selalu berarti dimiliki oleh Negara, dan bentuk usahanya adalah BUMN dengan varian Persero, Perjan, dan Perum. Bagi saya dikuasai oleh Negara berarti suatu iklim atau kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan Negara atau pemerintah untuk ikut berusaha atau menentukan dalam proses produksi. Iktut menentukan tidak selalu memiliki sendiri. Suatu cabang produksi dapat dimiliki oleh swasta tetap pemerintah mempunyai wewenang untuk ikut menentukan atau bahkan sepenuhnya menentukan jalannya proses produksi (Mubyarto & Baswir, 1989).

Penguasaan oleh Negara dapat mengambil berbagai gradasi. Yang paling ketat adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan diatur sepenuhnya oleh Negara. Sedang yang paling longgar adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh swasta tetapi Negara mempunyai wewenang untuk ikut mempengaruhi jalannya produksi. Contoh untuk yang pertama adalah perkeretaapian, sedang contoh untuk yang terakhir adalah pertekstilan. Di antara dua bentuk ini tentu ada berbagai variasi.

IV. KESIMPULAN

Konsep dalam sistem ekonomi pasar masih memperdebatkan apakah hasil kegiatan pertahanan adalah barang publik murni, karena bersifat noneksklusif dan nonrivalitas. Noneksklusif yaitu memberikan manfaat bagi semua warga negara tanpa kecuali. Manfaat dari hasil kegiatan ini dapat dikatakan sebagai tidak kasat mata (*intangible*). Nonrivalitas yaitu konsumsi tambahan dapat dimungkinkan tanpa biaya marjinal. Penggunaan tambahan satu unit barang tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang yang sama. Barang *public* seperti ini berbeda dengan barang privat, yang memberi manfaat hanya bagi orang-orang tertentu dan penggunaan tambahan satu unit oleh seseorang akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut.

Produk kegiatan pertahanan dalam sistem ekonomi kerakyatan dinyatakan sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka penyediannya dilakukan oleh negara, bukan oleh orang per orang atau oleh badan usaha swasta. Dalam penyediaan produk pertahanan ini, negara harus melakukannya secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya nasional yang dimiliki negara, dan banyak tujuan lain yang harus dipenuhi oleh negara, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan

pembangunan infrastruktur. Bagaimana memproduksi barang dan jasa pertahanan secara efektif dan efisien adalah kontribusi ilmu ekonomi pertahanan. Kegiatan pertahanan ini hampir mirip dengan kegiatan penyediaan infrastruktur barang public yang merupakan tugas pemerintah atau negara kepada rakyatnya. Namun demikian kegiatan untuk penyediaan infrastruktur pada saat ini sudah mengalami perubahan karena apabila pemerintah dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan tetapi infrastruktur tersebut, dimungkinkan untuk menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan tidak serta merta dilakukan oleh negara secara penuh. Pada saat ini pembiayaan untuk infrastruktur yang seperti itu dapat menggunakan kerja sama swasta dengan negara (public-Private Partnership/PPP). Sehingga terdapat relevansi dengan konsep yang dibangun dalam sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Boediono. 2012. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Case, Karl E. and Ray C. Fair. 2008. *Prinsip - Prinsip Ekonomi edisi 8 jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ervan Hermawan dalam <https://ervanhermawan46.wordpress.com/ekonomi-pembangunan/barang-publik/>. Diakses 25 Juni 2020.
- Gunning, J. Patrick. 2002. *Is National Defense a Public Good?*. Taiwan: Feng Chia University.
- Harrison, Lisa. 2019. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- <https://eng.unhas.ac.id/pwk/id/news/14-Barang-Publik-Perkotaan.html>. Diakses 25 Juni 2020.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. 2018. Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2(1), 154-167.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Macroeconomics*. Mason OH: South-Western Cengage Learning.
- Marlinah. 2017. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Cakrawala*, 17(2), 258-265.
- Mubyarto dan Revisond Baswir (Ed.). 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Palulun, Jesrifan Bara. (2016). Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Serbia Tahun 2011-2016. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4 (4), 1147-1160.
- Penjelasan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Sebelum Amandemen.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Darulqiyam Wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1), 48-63.
- Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tegor., Siswanto, Dwi Joko., Siagian, Mauli. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Tegor, T., Juliza, Yusmalina, & Haqiqi, F. (2021). Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). *JURNAL CAFETARIA*, 2(1), 13-24. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.276>.
- T Gurito. 1997. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Tuwanto, Pebri. 2015. Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global. *Jurnal Gema Keadilan*, 2(1), 1-10.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen I, II, III, dan IV.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
- Yulianti, Nurmaya; Firmansyah, Rizki & Sundari, Sri. 2020. Analisis Potensi Sektor Unggulan Kota Balikpapan Dalam Mempersiapkan Ibu Kota Baru Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan. *MONETER: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 1-13.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.